

Judul : dukung kebijakan WFA sambut lebaran, Senayan usul ASN layanan publik dapat kompensasi
Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Dukung Kebijakan WFA Sambut Lebaran

Senayan Usul ASN Layanan Publik Dapat Kompensasi

Senayan menyambut baik kebijakan Pemerintah menerapkan kebijakan *Work From Anywhere* (WFA) atau kerja di mana saja secara nasional bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta menjelang dan setelah Lebaran 2026.

KEBIJAKAN diberlakukan pada 16-17 Maret 2026 (sebelum Lebaran) dan 25-27 Maret 2026 (setelah Lebaran). Anggota Komisi II DPR Indrajaya menilai, kebijakan tersebut patut diapresiasi. Namun, kebijakan ini kudu mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh ASN, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pilihan untuk bekerja secara WFA.

"Tidak semua ASN berada dalam posisi yang setara. Ada kelompok yang sejak awal tidak mungkin bekerja secara jarak jauh karena fungsi dan mandatnya menuntut kehadiran fisik penuh," ujar Indrajaya dalam keterangannya, Rabu (10/2/2026).

Diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 terkait kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas

kedinasan sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 2026.

SE tersebut mengatur tentang sistem kerja dari mana saja (*work from anywhere* atau WFA) untuk ASN. Para pimpinan instansi diminta mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai ASN ini secara mandiri dan selektif.

Indrajaya melanjutkan, ASN di sektor layanan publik esensial juga tidak bisa WFA. Seperti, tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas dan rumah sakit, guru dan tenaga kependidikan, petugas kebakaran, pemadam kebakaran, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dislub), dan berbagai unit pelayanan langsung lainnya.

Bahkan, ASN layanan publik khususnya tenaga kesehatan, tetap bekerja dengan jam kerja panjang, sistem *shift*, dan layanan berkelanjutan hingga akhir pekan. Dalam banyak



Indrajaya

kasus, perbedaan beban tersebut belum diikuti dengan kebijakan kompensasi yang proporsional.

Untuk itu, ia mendorong KemenPAN-RB perlu membuat peraturan yang lebih berkeadilan, termasuk skema insentif, pengaturan jam kerja yang lebih manusiawi. "Bisa juga dalam bentuk kompensasi lain bagi ASN yang tidak memiliki fleksibilitas kerja," kata politikus PKB ini.

Dia bilang pengalaman sejumlah negara maju menunjukkan perbedaan karakter kerja aparatur justru dijadikan pijakan utama dalam merancang kebijakan. Di

beberapa negara Eropa menerapkan kerja fleksibel bagi aparatur administrasi. Namun pada saat yang sama, Pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada pekerja layanan esensial.

"Mulai dari tunjangan layanan garis depan, pengaturan kerja berbasis *shift* yang lebih adil hingga insentif khusus sebagai pengakuan atas beban dan risiko kerja," kata legislator asal daerah pemilihan (dapil) Papua Selatan ini.

Berbeda, anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus menilai, penerapan WFA perlu dikaji secara mendalam, karena seperti pisau bermata dua. Bisa menguntungkan dan sebaliknya juga dapat merugikan.

Dia bilang, penerapan WFA bisa meningkatkan produktivitas ASN di beberapa sektor atau jenis pekerjaan. Karena mereka terhindar dari macet dan ada waktu untuk keluarga. Bahkan bisa membantu mendorong konsumsi serta ekonomi riil. Namun, WFA juga berpotensi membuat para pegawai menganggapnya sebagai hari libur.

"WFA jangan diatur secara serampangan. Pemerintah harus memikirkan nasib para ASN yang

tidak bisa melakukan kebijakan itu," kata Deddy dalam keterangannya, Rabu (10/2/2026).

Deddy meminta agar dirumuskan sanksi terhadap ASN yang saat WFA malah tidak bekerja alias menganggap sebagai libur tambahan. Tujuannya, agar publik memahami dan bisa memikirkan dampaknya terhadap mereka.

Sementara, anggota Komisi II DPR Ujang Bey mengingatkan ASN tetap bekerja saat WFA. Sebab kebijakan itu bukan alasan untuk mengurangi produktivitas kerja.

"Kelenturan kerja ini jangan diartikan sebagai kerja 'leha-leha', tapi bekerja di luar tempat kerja tanpa mengurangi produktivitas kerja layaknya bekerja di kantor," ujar Ujang dalam keterangannya, Rabu (10/2/2026).

Ujang mengingatkan, WFA merupakan kelonggaran bagi ASN. Namun, harus tetap diberi target kerja yang jelas. Sedangkan untuk pekerjaan layanan yang membutuhkan bertatap muka langsung dengan masyarakat perlu diatur dengan baik. "Jangan sampai satu sama lain mengganggu produktivitas," tutup politikus Nasdem ini. ■ TIF